

VISI DAN MISI  
KANDIDAT DIREKTUR EKSEKUTIF NASIONAL WALHI  
PERIODE 2020-2024

Nama : Anton P Widjaya  
No Kontak : +62811 574 476  
Email : baratborneo@gmail.com

Salam adil dan lestari..!

Tonggak gerakan lingkungan hidup telah ditancapkan sejak empat dekade yang lalu. Hancurnya pilar penyangga keberlanjutan kehidupan rakyat dan perampasan sumber kehidupan rakyat di seluruh pelosok nusantara telah mendorong WALHI melakukan aksi penyadaran publik, kampanye dan advokasi kebijakan atas pentingnya lingkungan hidup dalam seluruh nafas pembangunan di Indonesia.

Statuta dalam mukadimahny telah menegaskan bahwa sistem ekonomi dan politik kapitalisme telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, mengancam masa depan bangsa dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Hegemoni kapitalisme ini telah menyebabkan isu keberlanjutan layanan alam dan kelestarian lingkungan hidup tidak menjadi isu utama rakyat. Kooptasi agenda kapitalisme global yang semakin dalam mencengkeram kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan rakyat menjadi model dalam kebijakan pembangunan negara. Kondisi ini menyebabkan isu kelestarian lingkungan semakin terpinggirkan dari isu-isu utama berbangsa dan bernegara.

Akumulasi pengerukan sumber daya alam melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan telah melahirkan krisis ekologis di Indonesia. Tidak hanya krisis lingkungan, kita telah mengalami krisis politik, ekonomi, sosial budaya dan ekologis. Saat ini, krisis ekologis tersebut telah bertransformasi menjadi krisis kemanusiaan yang mengancam keberlangsungan sumber-sumber kehidupan rakyat. Penghisapan sumber daya alam melalui skema perkebunan monokultur, aktivitas logging, pertambangan dan beragam bentuk jasa lingkungan telah menghancurkan 87 juta hektar daratan atau hampir 50% wilayah daratan Indonesia. Dengan 27 juta hektar area konservasi yang tidak memberi manfaat sosial ekonomi, menyebabkan rakyat petani dan masyarakat adat kehilangan tanah dan alat produksi mereka. Untuk mengelola sumber-sumber kehidupan yang tersisa pun masih dalam ancaman perampasan lahan.

Hari ini, seluruh gerak dan perjuangan organisasi WALHI dalam mewujudkan "ecological justice", belum mampu memberikan kemenangan bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Dalam beberapa periode kepemimpinan, jalan panjang mewujudkan "ecological justice" telah organisasi WALHI rintis dan kerjakan. Kerja keras dan pengerahan seluruh sumber daya sudah pula dilakukan, tetapi harus diakui hari ini keadilan ekologis tetap menjadi isu minor jika berhadapan dengan isu politik dan ekonomi dalam kebijakan negara.

Hari ini, jika kita mengukur perwujudan *“ecological justice”* di Indonesia, berbagai inisiatif, kerja keras dan perjuangan organisasi dalam mengkampanyekan berbagai pelanggaran dan praktek buruk korporasi, mengangkat berbagai bentuk kerusakan lingkungan, melakukan pembelaan rakyat korban kriminalisasi kekerasan, dan melakukan penyelamatan wilayah kelola rakyat, melakukan advokasi terhadap berbagai kebijakan negara yang tidak berpihak. Melakukan berbagai kajian dan gugatan hukum dan membangun serta memperkuat gerakan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan berbagai bentuk advokasi dan pembelaan lainnya, ternyata baru mampu memainstreamkan ecological-nya saja. Sementara terwujudnya keadilan ekologis masih menjadi pekerjaan rumah bagi WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup di Indonesia. Karena perwujudan keadilan ekologis mensyaratkan kolektivitas kerja bersama seluruh jaringan organisasi WALHI dan menstransformasinya menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat sipil dan masyarakat luas, karena sejatinya persoalan lingkungan hidup adalah persoalan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menghadapi berbagai perubahan isu dan tantangan ke depan, memperbaharui gerakan lingkungan hidup di Indonesia adalah keniscayaan guna memperoleh dukungan publik yang lebih luas. Pembaharuan gerakan melalui konsolidasi sosial politik lingkungan, mengoptimalkan seluruh sumber daya dan infrastruktur organisasi, meningkatkan produktivitas wilayah kelola rakyat, memperluas penggalangan dukungan publik, khususnya kaum muda, mengoptimalkan potensi dan peran anggota dan membangun dana kemandirian adalah jalan untuk memperkuat organisasi WALHI guna mengembalikan kedaulatan rakyat atas sumber kehidupan, memulihkan seluruh kerusakan ekologis akibat eksploitasi sumber daya alam dan memberikan tekanan kepada negara untuk menjalankan kewajiban konstitusinya.

VISI :

Mewujudkan WALHI sebagai Rumah Konsolidasi Gerakan Advokasi Lingkungan Hidup Terbesar, Berpengaruh dan Inklusif di Indonesia.

Perwujudan cita-cita organisasi ini dilakukan dengan :

1. Mengoptimalkan sumber daya dan infrastruktur WALHI nasional dan daerah dalam membangun sinergisitas advokasi dan kampanye organisasi di level daerah, nasional dan internasional.
2. Mengembangkan konsepsi ekonomi kerakyatan di seluruh wilayah kelola rakyat yang sudah dan sedang difasilitasi oleh WALHI sebagai perlawanan dan anti tesis atas hegemoni ekonomi dominan di Indonesia
3. Penggalangan dukungan publik, khususnya kelompok muda sebagai kelompok strategis melalui kampanye kreatif dan pendidikan.
4. Memfasilitasi konsolidasi gerakan politik hijau menjadi entitas kekuatan kolektif gerakan politik lingkungan hidup di Indonesia pada tahun 2024.
5. Mengembangkan kapasitas organisasi, khususnya kelompok pencinta alam, dan kapasitas rakyat dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana alam dan melawan bencana ekologis di seluruh Indonesia
6. Memperkuat kapasitas organisasi dan organisasi rakyat, termasuk organisasi/komunitas perempuan sebagai tulang punggung gerakan lingkungan hidup.

7. Membangun dan memperkuat sustainability fund dan kemandirian pendanaan organisasi melalui optimalisasi public fundrising, income generating dan pengelolaan pusat pendidikan di level nasional dan daerah.
8. Memperkuat kapasitas organisasi dan kader WALHI di seluruh wilayah Indonesia melalui transformasi pengetahuan dan teknologi.